



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V
RINCIAN ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	APBN
TRANSFER KE DAERAH	756.772.533.532
I. Dana Perimbangan	724.592.590.224
A. Dana Transfer Umum	524.223.746.621
1. Dana Bagi Hasil (DBH)	106.350.163.929
a. DBH Pajak	52.438.615.165
i. Pajak Penghasilan	31.336.017.770
ii. Pajak Bumi dan Bangunan	17.925.485.546
iii. Cukai Hasil Tembakau	3.177.111.849
b. DBH Sumber Daya Alam	53.911.548.764
i. Minyak Bumi dan Gas Bumi	30.941.378.050
ii. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	19.968.579.310
iii. Kehutanan	1.798.235.604
iv. Perikanan	500.648.736
v. Panas Bumi	702.707.064
2. Dana Alokasi Umum (DAU)	417.873.582.692
a. DAU Murni Formula	414.873.582.692
b. DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan	3.000.000.000
B. Dana Transfer Khusus	200.368.843.603
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	69.326.700.000
a. Pendidikan	16.859.000.000
b. Kesehatan dan Keluarga Berencana	19.875.400.000
c. Air Minum	2.070.750.000
d. Sanitasi	2.000.000.000
e. Perumahan dan Pemukiman	1.126.460.000
f. Pasar	1.772.690.000
g. Industri kecil dan menengah	540.000.000
h. Pertanian	1.900.000.000
i. Kelautan dan Perikanan	905.200.000
j. Pariwisata	1.003.400.000
k. Jalan	16.243.600.000
l. Irigasi	3.000.000.000
m. Lingkungan Hidup dan Kehutanan	530.200.000
n. Transportasi	1.500.000.000
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	131.042.143.603



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V
RINCIAN ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	APBN
a. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	51.226.860.000
b. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD	4.475.500.000
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan	1.548.500.000
d. Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	56.867.226.628
e. Tambahan Penghasilan Guru (TAMSIL) PNSD	914.100.000
f. Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD di Daerah Khusus	2.306.445.422
g. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	129.940.000
h. Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana (BOK & BOKB)	12.226.000.000
i. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (PK2UKM)	200.000.000
j. Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	907.500.000
k. Dana Pelayanan Kepariwisata	213.159.300
l. Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)	26.912.253
II. Dana Insentif Daerah	10.000.000.000
III. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan D.I.Yogyakarta	22.179.943.308
A. Dana Otonomi Khusus (Otsus)	20.979.943.308
1. Dana Otsus Provinsi Papua dan Papua Barat	8.357.471.654
a. Provinsi Papua	5.850.230.158
b. Provinsi Papua Barat	2.507.241.496
2. Dana Otsus Provinsi Aceh	8.357.471.654
3. Dana Tambahan Infrastruktur Dalam Rangka Otsus	4.265.000.000
a. Provinsi Papua	2.824.446.537



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V
RINCIAN ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	APBN
b. Provinsi Papua Barat	1.440.553.463
B. Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta	1.200.000.000
DANA DESA	70.000.000.000
J U M L A H	826.772.533.532

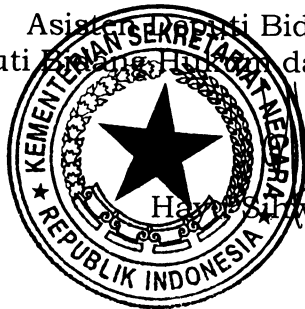
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Sekretaris Bidang Perekonomian
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,



[Handwritten Signature]
Haryono Wati Lestari